

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *JABAR ZERO NEW STUNTING* DI DESA SIRNAGALIH KABUPATEN TASIKMALAYA

Rd. Ade Purnawan^{1*}, Ai Nafitria Nurholipah², Mulyaningsih³, Nurbudiwati⁴
^{1,2,3,4} Universitas Garut, Garut, Indonesia

*Korespondensi : rd.purnawan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan Jabar Zero New Stunting di Desa Sirnagalih, Kabupaten Tasikmalaya. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan tujuh informan pada periode Februari-Maret 2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan Jabar Zero New Stunting di Desa Sirnagalih memberikan dampak positif, meskipun terdapat sejumlah tantangan dalam implementasinya. Kendala tersebut meliputi minimnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang kebijakan, rendahnya partisipasi dalam kegiatan posyandu, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya koordinasi antara berbagai pihak terkait. Salah satu permasalahan utama yang ditemukan adalah kurangnya kolaborasi antara masyarakat dan kader. Rekomendasi dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk memperbaiki dan mengembangkan upaya-upaya yang bertujuan untuk mengurangi angka stunting hingga mencapai nol pada tahun 2025.

Kata kunci: *Jabar Zero New Stunting*, Implementasi Kebijakan, Stunting.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of the Jabar Zero New Stunting policy in Sirnagalih Village, Tasikmalaya Regency. A quantitative approach was used with a case study design. Data collection was conducted through observation and interviews with seven informants in the February-March 2024 period. The results of the analysis show that the Jabar Zero New Stunting policy in Sirnagalih Village has a positive impact, although there are a number of challenges in its implementation. These obstacles include the lack of socialization and community understanding of the policy, low participation in posyandu activities, limited human resources, and lack of coordination between various related parties. One of the main problems found was the lack of collaboration between the community and cadres. Recommendations from this study can serve as a basis for improving and developing efforts aimed at reducing stunting rates to zero by 2025

Keywords: *Jabar Zero New Stunting, Policy Implementation, Stunting.*

A. PENDAHULUAN

Masalah stunting, yang memengaruhi pertumbuhan fisik dan kesehatan anak-anak di Indonesia, menjadi fokus utama dalam upaya mencapai Indonesia Emas 2045. Stunting merupakan

sebuah permasalahan gizi yang berkelanjutan yang bisa teridentifikasi dari tinggi badan anak yang tidak mencapai standar, dan hal ini memengaruhi perkembangan fisik dan kesehatan anak-anak. Hal ini berarti anak-anak yang

mengalami stunting cenderung memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari rata-rata anak sebayanya, dan kondisi ini dapat berdampak negatif pada pertumbuhan fisik dan kesehatan mereka (Surjaningrum et al., 2022). Prevalensi stunting mencapai 21,6% menurut Survei Status Gizi Indonesia 2022. Provinsi Jawa Barat termasuk wilayah terdampak, dengan angka stunting mencapai 24,5% pada tahun 2021. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan angka stunting. Selain itu, Pemerintah Jawa Barat menjalankan program *Jabar Zero New Stunting* yang bertujuan mendukung inisiatif nasional dalam mengurangi tingkat stunting. Targetnya adalah mencapai tingkat stunting sebesar 19,2% pada tahun 2023. Program ini bertujuan untuk menangani isu stunting secara lebih efektif di Jawa Barat, menciptakan generasi muda yang lebih sehat dan kompetitif, mendorong partisipasi aktif masyarakat, terutama dari orang tua balita dan calon pengantin, serta berperan dalam menurunkan prevalensi stunting secara nasional. Desa Sirnagalih yang menjadi salah satu desa di kecamatan Cigalontang kabupaten tasikmalaya provinsi Jawa barat yang terdampak angka stunting yang tinggi, menurut data dari [Sigiziterpadu.kemkes.go.id](#) (2024), terjadi fluktuasi jumlah kasus stunting di Desa Sirnagalih dari tahun ke tahun. Pada 2021, terdapat 68 individu atau setara dengan 20,48% yang menderita stunting. Angka tersebut meningkat menjadi 69 orang atau 26,44% pada tahun 2022. Namun, terjadi penurunan menjadi 32 orang atau 9,97% pada tahun 2023. Meskipun ada penurunan pada tahun 2023, jumlah kasus stunting masih di atas target yang diharapkan,

menunjukkan perlunya peningkatan upaya penanggulangan stunting di desa tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sejak dikeluarkannya kebijakan *Jabar Zero New Stunting*, Desa Sirnagalih mengadopsi kebijakan ini untuk menangani stunting. Pemerintah desa memberikan bantuan susu formula dan telur puyuh kepada 40 Keluarga Penerima Manfaat yang memiliki anak yang terdampak stunting. Selain itu, pemerintah desa juga melakukan kegiatan posyandu untuk memberikan vitamin kepada balita dan memberikan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya nutrisi yang seimbang. Namun, terdapat masalah dalam penyaluran bantuan kepada anak yang terdampak, dimana bantuan yang seharusnya diberikan setiap bulan tidak dilakukan dengan frekuensi yang telah ditentukan. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan desa sirnagalih dapat memberikan perhatian dan dukungan yang lebih baik untuk masyarakat yang terdampak stunting serta berperan aktif dalam program penanganan dan pencegahan stunting di Kabupaten Tasikmalaya.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang sangat relevan untuk menyelidiki fenomena dalam konteks sosial, terutama yang terkait dengan isu-isu masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif, Penelitian ini merupakan studi kualitatif deskriptif yang melakukan analisis data yang terkait dengan situasi yang sedang berlangsung, khususnya dalam konteks kebijakan *Jabar Zero New Stunting* di Desa Sirnagalih Kabupaten Tasikmalaya Selanjutnya penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari wawancara

dengan informan yang diantaranya Kepala Bidang Layanan Kesehatan, Kepala Desa Sirnagalih, dua Kader Posyandu Desa Sirnagalih, Bidan Desa Sirnagalih, dan dua Masyarakat. Serta data sekunder yang berupa rekaman, foto, serta data yang didapat dari jurnal, buku, serta instransi pemerintah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama observasi melakukan observasi tanpa struktur yang ketat terhadap proses pemecahan di Desa Sirnagalih, Kabupaten Tasikmalaya, dengan fokus pada penerapan kebijakan *Jabar Zero New Stunting* dan faktor penghambatnya. Kedua wawancara menggunakan wawancara semi terstruktur untuk mendalami implementasi kebijakan *Jabar Zero New Stunting* di Desa Sirnagalih, Kabupaten Tasikmalaya. Dan ketiga dokumentasi berupa bukti di lapangan mencakup foto, rekaman audio, serta dokumentasi mengenai fasilitas yang ada. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sirnagalih Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya. Waktu penelitian dilaksanakan pada 2023 dan selesai pada Maret 2024

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Kebijakan Jabar Zero New Stunting di Desa Sirnagalih Kabupaten Tasikmalaya

Program Jabar Zero New Stunting yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, merupakan inisiatif utama untuk mengurangi angka stunting di wilayah Jawa Barat. Melalui strategi konvergensi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, program ini bertujuan untuk menciptakan kondisi di mana Jawa Barat bebas dari kasus stunting pada tahun 2023. Berdasarkan survei pada tahun 2021, tingkat prevalensi stunting di Jawa Barat

mencapai 23,9%, yang dianggap masih tinggi. Program ini mengusung lima pilar utama:

1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak.
2. Peningkatan akses dan kualitas layanan air bersih dan sanitasi.
3. Peningkatan akses dan mutu pendidikan.
4. Peningkatan akses dan mutu ekonomi keluarga.
5. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus menurunkan prevalensi stunting, dengan target mencapai 14% pada tahun 2024 dan mencapai angka nol pada tahun 2025. Upaya-upaya yang dilakukan termasuk peningkatan koordinasi antar sektor, alokasi anggaran yang lebih besar, dan pengembangan inovasi baru. Salah satu contoh konkret dari implementasi program ini adalah adopsi kebijakan oleh Desa Sirnagalih. Desa Sirnagalih aktif terlibat dalam upaya menurunkan prevalensi stunting di wilayah Desa Sirnagalih dengan mengadopsi langkah-langkah seperti penerapan strategi program, pelaksanaan kegiatan edukasi dan sosialisasi, serta pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang tinggi protein. Partisipasi Desa Sirnagalih menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung visi Jawa Barat yang bebas dari stunting. Kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai target Jabar Zero New Stunting.

2. Implementasi kebijakan Jabar Zero New Stunting di Desa Sirnagalih Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, proses

implementasi kebijakan terdiri dari tiga tahap perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi. Model tersebut mencakup enam variabel kunci yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan Jabar Zero New Stunting di Desa Sirnagalih, Kabupaten Tasikmalaya. Berikut merupakan uraian dari masing-masing variabel berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut:

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Van Meter dan Van Horn pentingnya pentingnya memperhitungkan sikap pelaksana dalam mengevaluasi kinerja kebijakan, dengan tujuan menetapkan standar dan target yang realistis. Kinerja kebijakan dinilai berdasarkan pencapaian target yang telah ditetapkan. Kebijakan Jabar Zero New Stunting bertujuan menurunkan angka stunting di Desa Sirnagalih, meningkatkan kualitas gizi ibu hamil dan anak, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pencegahan stunting. Pelaksanaan kebijakan ini melibatkan kepala desa, kader posyandu, bidan desa, dan partisipasi orang tua. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, terlihat bahwa Hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan telah berhasil mencapai tujuannya dalam implementasi yang dilakukan oleh aparatur desa termasuk kader dan bidan Desa Sirnagalih, namun berdasarkan hasil wawancara dengan informan lain bahwa upaya untuk menyosialisasikan kebijakan tersebut masih belum dilakukan secara merata kepada masyarakat.

b. Sumber Daya

Implementasi kebijakan *Jabar Zero New Stunting* di Desa Sirnagalih sudah berhasil, tapi sosialisasinya masih kurang merata. Kurangnya sumber daya manusia, keuangan, dan waktu menjadi faktor utama.

Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih belum optimal, terutama karena kurangnya tenaga kesehatan dan pengetahuan kader. Dana desa dari APBN penting untuk mendukung program, meski penggunaannya perlu lebih terarah. Program sudah berjalan selama tiga tahun, tapi penurunan stunting belum mencapai target yang diinginkan. Perlu optimalisasi sumber daya agar program bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat.

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Keberhasilan suatu program sangat bergantung pada tanggung jawab yang diemban oleh badan pelaksana, yang harus memiliki karakteristik untuk tidak hanya merespons, tetapi juga mengevaluasi proses kebijakan secara optimal. Karakteristik ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan suatu program. Dalam implementasi kebijakan Jabar Zero New Stunting, sikap para pelaksana terhadap *Standar Operasional Prosedur (SOP)* sangat penting, termasuk pemahaman mendalam dan ketaatan penuh terhadap tugas yang telah ditetapkan. Pernyataan wawancara mengenai pentingnya sikap tersebut menjadi aspek kunci dalam menilai kesuksesan program. Pedoman kerja bagi para pelaksana adalah Peraturan Gubernur No.107 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah Provinsi Jawa Barat. Organisasi pelaksana utama melibatkan pemerintah desa, Kader Posyandu, Bidan Desa, dan masyarakat sebagai sasaran kebijakan ini. Koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan Kepala Desa, Bidan Desa, dan masyarakat, sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Sirnagalih. Berdasarkan hasil wawancara, menunjukkan bahwa koordinasi dilakukan dengan cara yang

terbuka, di mana informasi dan keputusan yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan disampaikan secara jelas kepada semua pihak terlibat. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan proses yang transparan dan inklusif, yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan hasil yang diharapkan.

d. Komunikasi antar Organisasi terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana

Dalam konteks pelaksanaan kebijakan Jabar Zero New Stunting di Desa Sirnagalih, penting bagi pelaksana kebijakan untuk memahami dengan jelas harapan dan tugas mereka. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada komunikasi yang tepat dan konsisten kepada pelaksana kebijakan, serta koordinasi yang efektif di antara semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan dan masyarakat, sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam program tersebut, menjadi kunci utama dalam menjamin kesuksesan program. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa interaksi tersebut belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan, dengan masyarakat cenderung mengikuti langkah tanpa pemahaman sepenuhnya. Berdasarkan hasil wawancara, pentingnya evaluasi dan perubahan dalam komunikasi menjadi sorotan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi komunikasi kepada pelaksana kebijakan, serta koordinasi yang lebih efektif di antara semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

e. Sikap Para Pelaksana

Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa sikap pelaksana kebijakan memiliki pengaruh besar

terhadap berhasilnya penerapan kebijakan. Penerimaan atau penolakan terhadap kebijakan seringkali terkait dengan bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi kepentingan individu dan organisasi. Kebijakan publik seringkali dirancang dari pihak yang berada di atas, sehingga para pengambil keputusan mungkin tidak sepenuhnya memahami atau tidak mampu memenuhi kebutuhan, keinginan, atau masalah yang harus diatasi. Pentingnya perhatian terhadap sikap para pelaksana dalam penerapan kebijakan menjadi sorotan utama. Aparatur pemerintah di semua tingkatan, termasuk di Kabupaten, Kecamatan, Desa, Kader Posyandu Desa, Bidan Desa, dan masyarakat sebagai kelompok sasaran, memiliki peran krusial dalam kesuksesan atau kegagalan penerapan Kebijakan Jabar Zero New Stunting. Dalam konteks implementasi kebijakan tersebut, sikap para pelaksana terhadap masyarakat dalam upaya menurunkan angka stunting dianggap sangat penting untuk mencapai kepuasan, yang merupakan indikator keberhasilan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan di Desa Sirnagalih, Kabupaten Tasikmalaya, memberikan manfaat yang dirasakan melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) oleh masyarakat, terutama bagi balita yang menerima bantuan atau dampak dari pelaksana kebijakan.

f. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Sirnagalih sangat mengapresiasi dan bersyukur atas keberadaan kebijakan Jabar Zero New Stunting ini. Dukungan yang diberikan oleh masyarakat, seperti mengikuti penyuluhan dan kegiatan lainnya setiap bulan,

membantu meningkatkan berat badan anak-anak secara bertahap. Meskipun beberapa orang mungkin mengalami kendala atau kesibukan dalam menghadiri kegiatan tersebut, mayoritas masyarakat tetap memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan ini. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa kondisi ekonomi masyarakat yang memiliki balita stunting dengan pendapatan rendah terbelah kurang mencukupi. Kebanyakan kepala rumah tangga di antara mereka bekerja sebagai pedagang, buruh, atau pekerja serabutan. Kendala ekonomi ini membuat mereka sulit memberikan makanan yang bergizi kepada anak-anak mereka. Selain itu, akses terhadap jaminan kesehatan juga menjadi perhatian, karena sebagian besar dari mereka masih belum memiliki jaminan tersebut. Dalam lingkungan politik, tidak ada kerjasama yang terlihat dari pihak eksternal atau partai politik. Kolaborasi hanya terjadi antara pelaksana kebijakan dan pemerintahan setempat, terutama dengan Ibu Kades dalam penetapan pemberian makanan tambahan kepada anak-anak stunting. Tidak adanya kerjasama dengan pihak politik atau sektor lain menekankan bahwa pelaksanaan kebijakan ini sepenuhnya dilakukan oleh pihak internal yang terlibat. Dengan demikian, evaluasi kinerja para pelaksana kebijakan juga perlu mempertimbangkan kondisi lingkungan eksternal, seperti dukungan masyarakat, kondisi ekonomi, dan politik. Upaya untuk meningkatkan kesuksesan kebijakan perlu memperhatikan kondisi-kondisi tersebut agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan bagi penurunan angka stunting di Desa Sirnagalih.

3. Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan *Jabar Zero New Stunting* Di Desa

Sirnagalih Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan temuan dari penelitian, ditemukan beberapa faktor yang menghambat implementasi kebijakan *Jabar Zero New Stunting* sebagai berikut :

a. Partisipasi Masyarakat terhadap Kegiatan-Kegiatan Posyandu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan Posyandu dan penyuluhan gizi terlihat rendah. Kader Desa mengungkapkan bahwa beberapa warga enggan menghadiri Posyandu karena mereka lebih memilih langsung pergi ke puskesmas, sehingga kader harus mendatangi mereka di rumah. Selain itu, sebagian masyarakat juga tidak mengikuti kegiatan yang diumumkan oleh kader karena memiliki kegiatan lain.

b. Komunikasi Tidak Efektif Dengan Masyarakat

Komunikasi antara pihak terkait dan masyarakat dinilai kurang efektif. Meskipun para pelaksana kebijakan mengetahui harapan masyarakat, tidak ada langkah konkret yang diambil untuk memenuhi kebutuhan mereka. Beberapa warga mengeluh bahwa kegiatan setelah Posyandu tidak memberikan perubahan yang signifikan. Selain itu, sebagian besar masyarakat tidak mengetahui tentang kebijakan *Jabar Zero New Stunting*

c. Sumber Daya Manusia Belum Optimal

Kurangnya sumber daya manusia dan kondisi ekonomi yang rendah juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Desa Sirnagalih memiliki akses terbatas ke layanan kesehatan dan kurangnya tenaga kesehatan serta sarana prasarana yang memadai. Beberapa kader juga tidak tepat dalam mengukur tinggi dan berat badan bayi, menyebabkan diagnosis stunting yang

tidak akurat.

d. **Pendapatan Masyarakat Yang Masih Kurang**

Kondisi ekonomi masyarakat yang rendah juga menghambat akses terhadap jaminan kesehatan dan pembiayaan kesehatan yang memadai. Dampaknya terlihat pada ketersediaan air bersih, sanitasi, serta pola makan ibu hamil dan anak balita yang tidak optimal.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masih ada beberapa kendala terkait SDM, terutama dalam bidang kesehatan, dan rendahnya partisipasi masyarakat di posyandu di Desa Sirnagalih, Kabupaten Tasikmalaya. Upaya perbaikan yang terus-menerus dari kader posyandu dan pemerintah diperlukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
2. Koordinasi implementasi kebijakan Jabar Zero New Stunting di Desa Sirnagalih dinilai baik, dengan keterlibatan semua pihak dan koordinasi yang terbuka menjadi kunci kesuksesan kebijakan ini.
3. Komunikasi antar stakeholders masih kurang efektif, khususnya antara kader desa, puskesmas, dan masyarakat. Meskipun telah ada upaya penyuluhan langsung, namun perubahan yang signifikan tidak terlihat.
4. Terdapat kesenjangan dalam pemahaman dan evaluasi terhadap kebutuhan masyarakat, dengan masyarakat cenderung hanya mengikuti arahan tanpa pemahaman

menyeluruh terhadap tujuan kebijakan.

5. Pelaksanaan kebijakan Jabar Zero New Stunting di Desa Sirnagalih dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat, namun beberapa saran dari masyarakat perlu dipertimbangkan untuk peningkatan lebih lanjut.
6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik memiliki peran penting dalam keberhasilan kebijakan ini, dengan perlunya peningkatan partisipasi masyarakat, penanganan masalah ekonomi, dan memperkuat kerjasama politik.
7. Faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan termasuk rendahnya partisipasi masyarakat di posyandu, kurangnya sumber daya manusia dalam penanganan dan penurunan angka stunting, serta kurangnya efektivitas komunikasi dengan masyarakat. Dalam mengatasi kendala tersebut, perlu ditingkatkan kolaborasi dan sinergi antara kader dan masyarakat, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh tahapan kebijakan, termasuk melalui metode *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan kesepakatan bersama.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amil, A., & Rachman, T. (2019). Implementasi Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Kasus Tentang Faktor-Faktor Yang

- Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Perambahan Hutan Di Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa Besar). *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 6(2), 152-153. <https://doi.org/10.31764/jiap.v6i2.653>
- Apriluana, G., & Fikawati, S. (2018). Analisis Faktor-Faktor Risiko terhadap Kejadian Stunting pada Balita (0-59 Bulan) di Negara Berkembang dan Asia Tenggara. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 28(4), 247–256. <https://doi.org/10.22435/mpk.v28i4.472>
- Dian Herdiana. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Stiacimahi.Ac.Id*, 14(November), 13–25.
- Febrian, F., & Yusran, R. (2021). Koordinasi Dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3(1), 11–21. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i1.214>
- Kadir, A. (2020). *Fenomena Kebijakan Publik dalam Perspektif Administrasi Publik di Indonesia*.
- Kusumawati, M. P. (2004). Harmonisasi antara etika publik dan kebijakan publik. *Encyclopedic Dictionary of Genetics, Genomics and Proteomics*, 6(1), 1–23. <https://doi.org/10.1002/0471684228.egp09588>
- Mulyaningsih et al. (2021). Regional Level Covid-19 Handling Policy with Autonomy Approach in Garut Regency. *JURNAL ILMU PEMERINTAHAN: Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 6(2), 65–73.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2017.820596>
- Surjaningrum et al. (2022). Peta potensi pengentasan stunting di kota surabaya. (*National Nutrition Journal, SP(1)*), 97–103